PELAKSANAAN FUNGSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Dionisius Kause
NPP. 33.0666
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: dhikakause04@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP
Email: abdulrahman@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement : *This study addresses the suboptimal implementation of Satlinmas (Community Protection Unit) functions in Timor Tengah Selatan Regency, where increasing public order violations from 112 cases in 2022 to 135 cases in 2024 indicate persistent challenges in maintaining community peace and order.* ***Purpose :*** *This study aims to analyze and provide a clear picture of how the Community Protection Unit (Satlinmas) functions in maintaining peace and order in South Central Timor Regency using the AGIL Theory approach.* ***Method :*** *This research uses a descriptive quantitative approach based on Talcott Parsons' social system theory through the AGIL framework (Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency). Data were collected through questionnaires (33 respondents), unstructured interviews, observation, and documentation, with analysis conducted using the Rasch Model (Winsteps software).* ***Result :*** *The results indicate that not all aspects of Satlinmas function implementation are operating optimally. The Adaptation dimension shows a high logit value for item A1 (+3.40), indicating that Satlinmas' ability to adapt to community characteristics remains weak. In the Integration dimension, community participation (item C3, logit +1.82) has not been optimal. However, inter-member cooperation (item C1, logit -2.36) and the maintenance of mutual cooperation values (item D2, logit -2.08) demonstrate strong performance and serve as organizational strengths.* ***Conclusion :*** *Satlinmas function implementation in Timor Tengah Selatan Regency has not yet reached optimal levels across all dimensions. Key challenges include limited adaptive capacity and insufficient community participation, while significant opportunities exist through strong internal teamwork and deeply rooted values of mutual cooperation. Strengthening member capacity, improving social communication approaches, and developing community-based strategies are recommended.*

Keywords : *AGIL, Community Protection, Public Peace and Order, Rasch Model Satlinmas*

ABSTRAK

Permasalahan : Penelitian ini membahas belum optimalnya pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) di Kabupaten Timor Tengah Selatan, di mana meningkatnya pelanggaran ketertiban umum dari 112 kasus pada tahun 2022 menjadi 135 kasus pada tahun 2024 mengindikasikan tantangan yang masih ada dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. **Tujuan :** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui pendekatan Teori AGIL. **Metode :** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan teori sistem sosial Talcott Parsons melalui pendekatan AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency).* Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner (33 responden), wawancara tidak terstruktur, observasi, dan dokumentasi, dengan analisis menggunakan Model Rasch (*software Winsteps*). **Hasil :** Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh aspek pelaksanaan fungsi Satlinmas berjalan secara optimal. Pada dimensi Adaptasi, indikator kemampuan Satlinmas menyesuaikan diri dengan karakter masyarakat (item A1) memiliki nilai logit tinggi (+3,40), mengindikasikan aspek yang masih lemah. Pada dimensi Integrasi, partisipasi masyarakat dalam kegiatan Satlinmas (item C3, logit +1,82) belum optimal. Namun, kerja sama antar anggota (item C1, logit -2,36) dan nilai gotong royong (item D2, logit -2,08) menunjukkan kinerja yang baik sebagai kekuatan organisasi. **Kesimpulan :** Pelaksanaan fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum mencapai tingkat optimal di seluruh dimensi. Tantangan utama meliputi keterbatasan kemampuan adaptasi dan rendahnya partisipasi masyarakat, sementara peluang strategis tersedia melalui kerja sama internal yang kuat dan nilai gotong royong yang mengakar. Penguatan kapasitas anggota, peningkatan pendekatan sosial, dan pengembangan strategi berbasis masyarakat sangat diperlukan.

Kata kunci : AGIL, Ketentraman dan Ketertiban, Model Rasch, Perlindungan Masyarakat, Satlinmas

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Ketentraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi di mana masyarakat hidup dalam suasana harmonis, aman, dan tanpa konflik signifikan, yang memungkinkan terlaksananya berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya secara optimal (Tamring, 2020). Kondisi ini mencerminkan stabilitas sosial yang berkelanjutan, di mana hak-hak individu terlindungi dan norma-norma kolektif dihormati. Namun demikian, data empiris menunjukkan bahwa situasi tersebut belum sepenuhnya tercapai di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ketentraman dan ketertiban masyarakat membuat masyarakat merasa aman, meminimalisir potensi konflik, dan memfasilitasi pemberdayaan komunitas untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan (Tamring, 2020).

Berdasarkan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Satpol PP Kabupaten Timor Tengah Selatan, menunujukan gangguan Trantibum mengalami kenaikan. Pada tahun 2022 jumlah pelanggaran mencapai 112 pelanggaran dengan 98 kasus yang di tangani Satpol PP dan 14 kasus ditangani oleh Satlinmas yang semakin meningkat pada tahun 2024 dengan jumlah 135 pelanggaran dengan 130 kasus yang ditangani Satpol PP dan 5 kasus yang ditangani Satlinmas seperti penanganan gangguan, penanganan bencana dan keadaaan darurat. Jika dilihat dari data di atas, maka gangguan Trantibum yang terjadi dari tahun 2022 sampai 2024, sudah bisa menggambarkan bahwa kondisis di kabupaten Timor Tengah Selatan masih jauh dari kata aman dan tertib. Fakta ini menunjukkan bahwa stabilitas sosial di

Kabupaten Timor Tengah Selatan masih rentan terhadap gangguan yang bersumber dari faktor sosial, ekonomi, maupun budaya.

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 diposisikan sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Namun, keberadaan Satlinmas di Kabupaten TTS masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana yang minim, serta keterlibatan masyarakat yang belum optimal. Berdasarkan Laporan Penyelengaran Pemerintah Daerah (LPPD) Satuan Polisis Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan, dari 266 desa dan kelurahan, hanya 95 desa (35,7%) yang memiliki pos Linmas permanen, dan anggaran operasional pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah. Ketersediaan kendaraan operasional juga masih jauh dari kebutuhan ideal, dengan belum adanya sepeda motor untuk patroli, sementara wilayah kerja Satlinmas mencakup cukup dengan topografi pegunungan dan akses jalan terbatas. Selain itu, belum ada personel yang memiliki alat komunikasi lapangan (HT), dan sebagian besar belum mendapatkan seragam serta perlengkapan standar. Keterbatasan ini diperparah oleh minimnya anggaran operasional, yang pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 1,6 miliar rupiah atau kurang dari separuh kebutuhan ideal. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya mobilitas, koordinasi, dan efektivitas pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam menjaga ketertiban dan ketentraman di wilayah pedesaan TTS. Meskipun memiliki peran strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, keberadaan Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) masih sering dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat maupun pemerintah daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang membuat kinerja Satlinmas kurang optimal di lapangan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di daerah. Secara normatif, keberadaan Satlinmas telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, yang menegaskan bahwa Satlinmas memiliki tugas membantu pemerintah daerah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, kondisi empiris di Kabupaten Timor Tengah Selatan menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi Satlinmas masih menghadapi berbagai kendala yang berdampak pada efektivitas pelaksanaan tugasnya. Hal ini terlihat dari keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya dukungan anggaran, serta masih adanya hambatan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dari 266 desa dan kelurahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, hanya sekitar 35,7% yang memiliki pos Linmas permanen, sementara sebagian besar anggota Satlinmas masih bertugas tanpa dukungan kendaraan operasional, alat komunikasi, maupun perlengkapan standar yang memadai. Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya mobilitas dan efektivitas pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat

Di sisi lain, Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki karakteristik wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang cukup menantang serta dinamika sosial masyarakat yang beragam. Potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masih ditemukan, baik berupa kenakalan remaja, pelanggaran ketertiban umum, konflik sosial, maupun berbagai bentuk gangguan keamanan lainnya. Data pengaduan masyarakat tahun 2024 menunjukkan bahwa berbagai laporan gangguan ketertiban umum berhasil ditangani oleh Satpol PP bersama unsur terkait, mulai dari pengamanan siswa bolos sekolah, penanganan kebakaran, hingga penertiban pelanggaran fasilitas umum. Meskipun demikian, masih terdapat permasalahan yang bersifat berulang sehingga menunjukkan perlunya penguatan fungsi Satlinmas secara berkelanjutan,

tidak hanya dalam aspek penanganan, tetapi juga pada aspek pencegahan dan pembinaan masyarakat.

Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis pelaksanaan fungsi Satlinmas menggunakan pendekatan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons melalui dimensi AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) untuk melihat sejauh mana fungsi Satlinmas mampu beradaptasi dengan lingkungan, mencapai tujuan organisasi, membangun integrasi dengan masyarakat, serta memelihara nilai dan norma yang mendukung terciptanya ketenteraman dan ketertiban. Padahal, pendekatan tersebut penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi Satlinmas sebagai bagian dari sistem sosial pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan mengkaji secara lebih mendalam pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui pendekatan teori AGIL Talcott Parsons. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada kapasitas atau tugas Satlinmas, tetapi juga menilai bagaimana fungsi Satlinmas dijalankan serta bagaimana kontribusinya dalam menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kebaruan (novelty) baik dari sisi fokus kajian, pendekatan teori, maupun lokus penelitian di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian mengenai pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Selatan penting untuk dilakukan mengingat Satlinmas merupakan salah satu unsur strategis pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Keberadaan Satlinmas memiliki peran penting dalam membantu pemerintah daerah menjaga stabilitas sosial, mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum, membantu penanggulangan bencana, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, pelaksanaan fungsi Satlinmas masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan anggaran, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung tugas-tugas perlindungan masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat terwujudnya ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara optimal.

Secara keilmuan, penelitian ini penting karena dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya dalam bidang perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum. Selama ini, penelitian mengenai Satlinmas lebih banyak berfokus pada aspek kapasitas organisasi, partisipasi masyarakat, atau pelaksanaan tugas Satlinmas secara umum. Sementara itu, penelitian yang secara khusus mengkaji pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat melalui pendekatan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons (AGIL) masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan perspektif baru dalam memahami peran Satlinmas sebagai bagian dari sistem sosial pemerintahan daerah.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan, khususnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat, dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja Satlinmas. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam menyusun program peningkatan kapasitas anggota Satlinmas, penguatan koordinasi kelembagaan, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan strategi

pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban lingkungan. Dengan adanya data empiris yang diperoleh melalui penelitian ini, pemerintah daerah dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan kebutuhan riil di lapangan.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual pelaksanaan fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Akibatnya, berbagai kebijakan yang disusun berisiko kurang tepat sasaran karena tidak didasarkan pada analisis yang komprehensif mengenai faktor pendukung, faktor penghambat, serta peluang pengembangan Satlinmas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat menyebabkan pelaksanaan fungsi Satlinmas berjalan kurang optimal, sehingga potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat sulit dicegah secara efektif. Selain itu, upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan tenteram dapat terhambat karena tidak didukung oleh rekomendasi kebijakan yang berbasis pada hasil penelitian dan kebutuhan nyata masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya menunjukkan persamaan dan perbedaan yang relevan. Penelitian oleh Cindy Melania Maharani Lesmana (2025) tentang penguatan kapasitas Satlinmas dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kapasitas individu, organisasi, dan sistem masih belum optimal akibat keterbatasan anggaran, kemampuan personel, serta dukungan regulasi. Selanjutnya, penelitian Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasim (2022) berfokus pada optimalisasi peran serta masyarakat dalam Satlinmas guna meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum, yang menemukan bahwa aspek anggaran, eksistensi Satlinmas di masyarakat, dan lemahnya koordinasi kelembagaan menjadi hambatan utama. Penelitian lainnya oleh Yoga Narendra Panggabean (2025) mengkaji peran Satlinmas dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sedangkan penelitian Verdiansyah (2024) berfokus pada pelaksanaan tugas Satlinmas dan faktor-faktor penghambatnya. Terakhir penelitian Kurhayadi (2024) yang mengkaji fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di Kota Bandung dalam kerangka Sishankamrata dengan menggunakan pendekatan mixed-methods, penelitian ini mengevaluasi kondisi Satlinmas dan menemukan adanya kelemahan pada dimensi personal, organisasi, dan sistem kelembagaan, sehingga menegaskan perlunya intervensi capacity-building yang lebih terarah serta pentingnya keterlibatan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas Sishankamrata.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu mengenai Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus menganalisis pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan, bukan hanya pada aspek kapasitas organisasi, peran serta masyarakat, maupun pelaksanaan tugas Satlinmas sebagaimana penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Sistem Sosial Talcott Parsons (1951) dengan pendekatan AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency) sebagai alat analisis untuk menilai pelaksanaan fungsi Satlinmas sebagai bagian dari sistem sosial pemerintahan daerah, yang berbeda dari penelitian terdahulu yang menggunakan Teori Capacity Building, Teori Optimalisasi, Teori Peran,

maupun Teori Pelaksanaan. Dari sisi metodologi, penelitian ini juga memiliki kebaruan karena menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan Rasch Model, sehingga mampu memberikan pengukuran yang lebih objektif terhadap pelaksanaan fungsi Satlinmas berdasarkan persepsi responden. Selain itu, penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang memiliki karakteristik wilayah, kondisi geografis, dan dinamika sosial yang berbeda dengan lokus penelitian terdahulu. Dengan demikian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada perbedaan fokus penelitian, penggunaan teori AGIL, penerapan Rasch Model, serta karakteristik lokus penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi pengembangan kajian perlindungan masyarakat dan penyelenggaraan ketenteraman serta ketertiban umum.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Selatan melalui pendekatan Teori AGIL.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data dari orang-orang yang mengisi angket. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berupaya mendapatkan data yang akurat dan aktual, kemudian dibahas secara sistematis untuk mengambil kesimpulan sebagai pemecahan masalah. Pendekatan kuantitatif dianggap paling tepat untuk mengukur tingkat pelaksanaan fungsi Satlinmas secara objektif berdasarkan persepsi dan penilaian responden.

Pengumpulan data dilakukan melalui angket (kuesioner) dengan skala Likert kepada 33 responden yang dipilih secara purposive sampling, meliputi Kasat Pol PP/Kabid Linmas (2 orang), Camat/Kasi Trantib (2 orang), Kepala Desa/Lurah (3 orang), anggota Satlinmas dari Kelurahan Cendana, Desa Napi, dan Desa Naile'u (masing-masing 5 orang), serta tokoh masyarakat (10 orang). Pemilihan responden berdasarkan pertimbangan keterwakilan fungsi, tugas, dan peran masing-masing pihak dalam pelaksanaan Satlinmas. Selain kuesioner, data juga diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, observasi non-partisipatif, dan dokumentasi.

Teknik analisis data menggunakan Pemodelan Rasch dengan software Winsteps melalui tahapan: (1) uji validitas dengan melihat nilai Outfit MNSQ ($0,5 < MNSQ < 1,5$), Outfit ZSTD ($-2,0 < ZSTD < +2,0$), dan Pt Mean Corr ($0,4 <$ Pt Measure Corr $< 0,85$); (2) uji reliabilitas menggunakan nilai Cronbach Alpha; (3) uji kualitas instrumen melalui Wright Map dan Item Measure; (4) uji unidimensionalitas; dan (5) analisis skala peringkat (Rating Scale Analysis). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari bulan Januari 2026 hingga April 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban menggunakan teori sistem sosial AGIL Talcott Parsons (1951) yang mencakup empat dimensi: *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi).

Penelitian ini berfokus ada variabel Pelaksanaan Fungsi. Pernyataan kuesioner/angket penelitian akan digunakan untuk mengukur setiap variabel. Tabel berikut menunjukkan indikasi yang menjadi dasar pedoman item pernyataan.

Tabel 1.
Indikasi yang menjadi dasar pedoman item pernyataan

Variabel	Dimensi	Indikator	Instrumen
Pelaksanaan Fungsi	*Adaptation /Adaptasi* (A)	-kemampuan menyesuaikan diri dengan masyarakat (A1)	Angket
		- pemanfaatan sarana dan sumber daya Satlinmas (A2)	Angket
		- Kemampuan menghadapi perubahan situasi dan kondisi lingkungan tugas (A3)	Angket
	Goal Attainment /Tujuan (G)	-kejelasan tujuan kegiatan Satlinmas (B1)	Angket
		-pencapaian target kinerja dalam menjaga ketertiban (B2)	Angket
		- Evaluasi dan tindak lanjut hasil kegiatan (B3)	Angket
	Integration /Integrasi (I)	-kerja sama dalam penyelesaian masalah keamanan (C1)	Angket
		- Koordinasi dengan instansi terkait (C2)	Angket
		-Partisipasi masyarakat dalam kegiatan Satlinmas (C3)	Angket
	Latency /Latensi (L)	-Pembinaan nilai disiplin dan tanggung jawab anggota (D1)	Angket
		-Pelestarian nilai gotong royong dan kepedulian sosial (D2)	Angket
		- Pengembangan motivasi dan loyalitas anggota (D3)	Angket

Sumber : diolah oleh peneliti 2026

Berdasarkan teori sistem sosial *AGIL Talcott Parsons*, variabel ini dijabarkan ke dalam empat dimensi, yaitu *Adaptation, Goal Attainment, Integration,* dan *Latency.* Dimensi *Adaptation* mencerminkan kemampuan Satlinmas menyesuaikan diri dengan masyarakat serta memanfaatkan sarana dan sumber daya yang tersedia. Dimensi *Goal Attainment* menunjukkan kejelasan tujuan kegiatan dan tingkat pencapaian kinerja dalam menjaga ketertiban. Dimensi *Integration* menggambarkan kerja sama antaranggota dan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelesaian masalah keamanan, sedangkan *Latency* menekankan pembinaan nilai disiplin, tanggung jawab, gotong royong, dan kepedulian sosial anggota Satlinmas. Seluruh dimensi tersebut diukur menggunakan instrumen angket untuk memperoleh data yang objektif mengenai pelaksanaan fungsi Satlinmas di lapangan.

3.1. Uji Kualitas Instrumen

Hasil uji validitas menunjukkan nilai *Outfit* MNsQ sebesar 1,39 (memenuhi syarat 0,5 < MNSQ < 1,5), nilai Outfit ZSTD sebesar 1,50 (memenuhi syarat -2,0 < ZSTD < +2,0), dan nilai Pt Mean Corr seluruh item berada dalam rentang yang diterima (0,4 < Pt Measure < 0,85). Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* sebesar 0,78, yang mengindikasikan bahwa instrumen penelitian reliabel. Pengujian unidimensionalitas menunjukkan nilai *raw*

variance explained sebesar 51,7% (memenuhi syarat minimal 20%), dengan seluruh nilai *unexplained variance* di bawah 15%.

Tabel 2.

Kesimpulan Berdasarkan Output Hasil Uji Kualitas Instrumen

KODE	MUDAH DISETUJUI	KODE	SULIT DISETUJUI
C1	Satlinmas bekerja sama dengan baik antar anggota dalam menyelesaikan masalah keamanan di masyarakat	A1	Satlinmas mampu menyesuaikan diri dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah tugasnya
D2	Nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial masih dijaga dan dilaksanakan dalam kegiatan Satlinmas	C3	Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Satlinmas

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2026

3.2. Dimensi Adaptasi (A)

Hasil analisis *Rasch* menunjukkan bahwa item A1 (kemampuan Satlinmas menyesuaikan diri dengan karakter dan kebutuhan masyarakat) memiliki nilai logit yang relatif tinggi (+3,40 logit), dan item A3 (kemampuan beradaptasi terhadap perubahan situasi) berada pada kategori sulit disetujui (+1,25 logit). Nilai logit yang tinggi mengindikasikan bahwa sebagian besar responden tidak mudah menyetujui pernyataan terkait kemampuan adaptasi Satlinmas. Hal ini berarti fungsi adaptasi Satlinmas masih lemah, disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya pelatihan, serta rendahnya kemampuan anggota dalam memahami dinamika sosial masyarakat.

Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan (15 Januari 2026) yang menyatakan bahwa kemampuan anggota Satlinmas dalam menyesuaikan diri dengan karakter dan kebutuhan masyarakat belum optimal karena keterbatasan pelatihan dan pembinaan. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, anggota Satlinmas cenderung masih bersifat reaktif, yaitu bertindak setelah terjadi gangguan ketertiban, bukan melakukan pencegahan secara dini.

3.3. Dimensi Pencapaian Tujuan (B)

Beberapa item dalam dimensi ini menunjukkan nilai logit yang lebih rendah (kisaran -1,03 hingga +0,67 logit), yang berarti relatif mudah disetujui oleh responden. Item B1 (kejelasan tujuan kegiatan Satlinmas) merupakan salah satu item yang cukup mudah disetujui. Hal ini menunjukkan bahwa Satlinmas dinilai telah menjalankan perannya dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, meskipun pencapaian tujuan belum sepenuhnya konsisten di seluruh wilayah. Distribusi item yang berada di sekitar nilai tengah mengindikasikan bahwa pelaksanaan fungsi ini cukup berjalan, tetapi belum kuat secara merata.

3.4. Dimensi Integrasi (C)

Hasil analisis *Rasch* menunjukkan ketimpangan dalam dimensi integrasi. Item C1 (kerja sama antar anggota) memiliki nilai logit yang sangat rendah (-2,36 logit), menunjukkan bahwa pernyataan ini sangat mudah disetujui oleh responden. Sementara itu, item C3 (partisipasi masyarakat dalam kegiatan Satlinmas) berada pada nilai logit lebih tinggi (+1,82 logit), sehingga tergolong sulit disetujui. Temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan sosial

internal antar anggota Satlinmas sudah tergolong baik, namun koordinasi formal dan partisipasi masyarakat masih lemah.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Kelurahan Cendana, Bapak Yohanes Nuban (18 Februari 2026), mengonfirmasi bahwa kerja sama internal Satlinmas sudah cukup baik. Namun, keterlibatan masyarakat belum terlalu aktif karena kurangnya sosialisasi dan kesadaran masyarakat bahwa menjaga ketentraman merupakan tanggung jawab bersama.

3.5. Dimensi Latensi (D)

Item D2 (nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial) menunjukkan nilai logit yang sangat rendah (-2,08 logit), yang berarti sangat mudah disetujui oleh responden. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai-nilai luhur tersebut masih mengakar kuat dan secara konsisten diterapkan dalam aktivitas Satlinmas, menjadi kekuatan internal organisasi. Namun, item D1 (pembinaan nilai disiplin dan tanggung jawab) dan D3 (pengembangan motivasi dan loyalitas anggota) menunjukkan variasi nilai logit yang lebih tinggi, mengindikasikan bahwa pembinaan dan penguatan nilai organisasi belum merata.

Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, Bapak Markus Kolo (20 Januari 2026), mengonfirmasi bahwa nilai-nilai gotong royong masih kuat terutama dalam kegiatan pengamanan acara adat. Namun, pembinaan internal terkait disiplin dan tanggung jawab anggota belum berjalan secara rutin dan konsisten.

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan hasil *Wright Map Rasch Model*, diperoleh bahwa item yang paling mudah disetujui oleh responden adalah C1 dengan logit -2,36 (Satlinmas bekerja sama dengan baik antar anggota dalam menyelesaikan masalah keamanan di masyarakat) dan D2 dengan logit -2,08 (Nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial masih dijaga dan dilaksanakan dalam kegiatan Satlinmas). Temuan ini menunjukkan bahwa responden menilai aspek kerja sama internal anggota Satlinmas serta pemeliharaan nilai-nilai sosial masih berjalan dengan baik dalam pelaksanaan fungsi Satlinmas di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dimensi *Integration* dan *Latency* dalam teori AGIL telah terlaksana secara relatif optimal, karena adanya hubungan kerja yang baik antaranggota serta masih terpeliharanya nilai-nilai sosial yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Satlinmas. Temuan ini sejalan dengan penelitian Wahid Rahmat Hidayat Muhammad Hasim (2022) yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Satlinmas sangat dipengaruhi oleh kerja sama, koordinasi, dan keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Temuan ini juga memperkuat pandangan Talcott Parsons bahwa integrasi dan pemeliharaan pola merupakan elemen penting bagi keberlangsungan suatu sistem sosial.

Sebaliknya, item yang paling sulit disetujui oleh responden adalah A1 dengan logit +3,40 (Satlinmas mampu menyesuaikan diri dengan karakter dan kebutuhan masyarakat di wilayah tugasnya) dan C3 dengan logit +1,82 (Masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Satlinmas). Temuan ini menunjukkan bahwa kemampuan adaptasi Satlinmas terhadap kebutuhan masyarakat serta tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan Satlinmas masih belum optimal. Hasil ini mengindikasikan bahwa dimensi Adaptation dan sebagian aspek Integration masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya. Berbeda dengan temuan penelitian Yoga Narendra Panggabean (2025) yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung kegiatan Satlinmas telah berjalan cukup baik, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi masyarakat di Kabupaten Timor Tengah Selatan masih perlu ditingkatkan. Perbedaan tersebut dapat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah penelitian yang berbeda, terutama kondisi geografis Kabupaten Timor Tengah Selatan yang luas serta persebaran penduduk yang berjauhan sehingga menyulitkan proses interaksi dan

pemberdayaan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan adaptasi Satlinmas terhadap kebutuhan masyarakat dan penguatan partisipasi masyarakat menjadi aspek yang perlu mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penelitian ini menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Salah satu faktor pendukung yang paling menonjol adalah kuatnya kerja sama antaranggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota Satlinmas memiliki hubungan kerja yang cukup baik, saling membantu dalam pelaksanaan tugas, serta mampu membangun koordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan lainnya. Selain itu, nilai-nilai gotong royong dan kepedulian sosial yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pelaksanaan fungsi Satlinmas.

Temuan menarik lainnya adalah masih kuatnya komitmen anggota Satlinmas untuk menjalankan tugas meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan. Sebagian besar anggota tetap berpartisipasi dalam kegiatan pengamanan lingkungan, penanganan kegiatan masyarakat, maupun kegiatan perlindungan masyarakat lainnya sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat dan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek pengabdian dan rasa tanggung jawab sosial masih menjadi faktor pendorong utama dalam pelaksanaan fungsi Satlinmas.

Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan beberapa faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi Satlinmas. Faktor penghambat utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, seperti kurangnya peralatan operasional, alat komunikasi, kendaraan operasional, serta fasilitas penunjang lainnya. Keterbatasan tersebut menyebabkan pelaksanaan tugas di lapangan belum dapat berjalan secara optimal, terutama pada wilayah yang memiliki jangkauan geografis luas seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Selain keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Satlinmas juga menjadi temuan penting dalam penelitian ini. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa urusan keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab pemerintah dan aparat keamanan semata, sehingga keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perlindungan masyarakat belum maksimal. Kondisi ini berdampak pada kurang optimalnya upaya pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban yang seharusnya dapat dilakukan secara kolaboratif antara Satlinmas dan masyarakat.

Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan fungsi Satlinmas tidak hanya ditentukan oleh kemampuan anggota Satlinmas itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan sarana dan prasarana, koordinasi antarlembaga, serta tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas organisasi, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan kesadaran masyarakat agar pelaksanaan fungsi Satlinmas dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam mewujudkan ketentraman dan ketertiban di Kabupaten Timor Tengah Selatan belum berjalan secara optimal di seluruh dimensi. Berdasarkan analisis Model

Rasch dengan pendekatan AGIL, dimensi adaptasi dan partisipasi masyarakat dalam integrasi merupakan aspek yang masih lemah, sementara kerja sama antar anggota dan nilai gotong royong menjadi kekuatan organisasi yang dapat dioptimalkan. Tantangan utama mencakup rendahnya kemampuan adaptasi anggota terhadap karakteristik masyarakat serta minimnya partisipasi aktif masyarakat, sedangkan peluang strategis tersedia melalui soliditas tim internal dan nilai-nilai kemasyarakatan yang mengakar.

Diperlukan penguatan kapasitas anggota Satlinmas melalui pelatihan sosial budaya, peningkatan dukungan anggaran dan sarana prasarana, serta pengembangan pendekatan berbasis masyarakat (community-based approach) yang memanfaatkan nilai gotong royong setempat. Pemerintah daerah juga perlu mengoptimalkan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah responden (33 orang) yang hanya mencakup tiga desa/kelurahan dari 278 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten TTS, sehingga generalisasi hasil penelitian perlu dilakukan secara hati-hati. Selain itu, penggunaan kuesioner tunggal sebagai instrumen utama memiliki keterbatasan dalam menangkap kompleksitas fenomena sosial yang sesungguhnya.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian lanjutan disarankan untuk mencakup lebih banyak desa/kelurahan dengan metode penelitian campuran (mixed methods) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Kajian perbandingan antara kabupaten di NTT juga direkomendasikan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Bapak Dr. H. Abdul Rahman, S.Pd, M.Pd, M.AP selaku dosen pembimbing; Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan beserta seluruh jajarannya; seluruh responden dan informan yang telah meluangkan waktu; serta Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang telah memberikan fasilitas dan dukungan dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Pustaka Interes.

Parsons, T. (1951). The social system. Free Press.

Simangunsong, F. (2017). Metodologi Penelitian Pemerintahan (Cetakan Kedua). ALFABETA, cv.

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & R&D. Alfabeta.

Sumintono, B., & Widhiarso, W. (2014). Aplikasi Model Rasch untuk Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial (B. Trim, Ed.). Trim Komunikata.

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum. Gramedia.

Jurnal

Imayah, F., Batjo, A. A., Irawan, A. D., & Yustitianingtyas, L. (2023). Toleransi Dalam Kehidupan Masyarakat Kupang. *Jurnal Citizenship Virtues, 3*(1), 408–414. https://doi.org/10.37640/JCV.V3I1.1693

Kurhayadi, K. (2024). Enhancing public safety and order: Assessing the role of SATLINMAS in Bandung. *Journal of Infrastructure, Policy and Development, 8*(7), 4995. https://doi.org/10.24294/jipd.v8i7.4995

Pramono, J., & Kusumastuti, D. (2021). The community protection on disaster mitigation perspective of local government law: An empirical study. *Wacana Hukum, 27*(1), 56–67. https://doi.org/10.33061/WH.V27I1.4046

Rasya, H. S., & Triadi, I. (2024). Akses Keadilan dan Kesenjangan Sosial: Transformasi Melalui Peran Hukum Tata Negara. *Indonesian Journal of Law and Justice, 1*(4), 12–12. https://doi.org/10.47134/IJLJ.V1I4.2330

Rozak, A., Sri Kartini, D., Djuyandi, Y., & Kunci, K. (2020). Strategi Survivalitas Warga dan Politik Survivalitas Aktor Politik pada Konflik Pertambangan. *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11*(1), 53–75. https://doi.org/10.14710/POLITIKA.11.1.2020.53-75

Tamring, B. A. M., Esa, M. S., & Ibrahim, M. A. (2020). Hubungan Kaum dalam Kawasan Rukun Tetangga (KRT) di Pantai Barat Sabah. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 5*(11), 147–158. https://doi.org/10.47405/MJSSH.V5I11.542

Yunita, A. (2021). The improvement of civil consciousness of law for the endorsement of law and economic development in Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 6*(2), 318–328. https://doi.org/10.33760/JCH.V6I2.339

Indrayani, E., & Wasistiono, S. (2021). The role of community protection institution in disaster management at West Java, Indonesia. *Jàmbâ: Journal of Disaster Risk Studies, 13*(1), a943. https://doi.org/10.4102/jamba.v13i1.943

Pitaloka, D. A. E., Kusuma, I. Y., Pratiwi, H., & Pradipta, I. S. (2023). Development and validation of assessment instrument for the perception and attitude toward tuberculosis among the general population in Indonesia: a Rasch analysis of psychometric properties. *Frontiers in Public Health, 11*, 1143120. https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1143120

Getnet, M., Tesema, A., & Beyene, A. (2025). The role of community policing structures in enhancing safety, security, and local crime prevention in Addis Ababa City Administration. *SN Social Sciences, 5*(10), 1–24. https://doi.org/10.1007/s43545-025-01195-6

Kusuma, I. Y., Triwibowo, D. N., Pratiwi, A. D. E., & Pitaloka, D. A. E. (2022). Rasch modelling to assess psychometric validation of the knowledge about tuberculosis questionnaire (KATUB-Q) for the general population in Indonesia. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(24), 16753. https://doi.org/10.3390/ijerph192416753

Kolopaking, L. M., & Kinseng, R. A. (2025). Assessing village democracy and welfare in rural Indonesia: an index-based correlation analysis. *Frontiers in Political Science, 7*, 1622507. https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1622507

Amandaria, R., Darma, R., Tamrin, S., Rahmadanih, R., & Untari, U. (2026). Shifting collective values: the role of rural women and gotong royong in village fund policy. *Humanities and Social Sciences Communications, 13*(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41599-025-04577-6

Tennant, A., & Küçükdeveci, A. A. (2023*). Application of the Rasch measurement model in rehabilitation research and practice: early developments, current practice, and future challenges. Frontiers in Rehabilitation Sciences, 4*, 1208670. https://doi.org/10.3389/fresc.2023.1208670

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Laporan

Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2024). Statistik Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 2024. BPS Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Selatan. (2024). Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Satpol PP Kabupaten TTS Tahun 2024. Satpol PP TTS.